

# **TANTANGAN DAN HAMBATAN DEMOKRASI DI DUNIA ISLAM**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah PPMDI  
(Perkembangan Pemikiran Modern Dalam Islam)

Dosen Pengampu :  
Dr. H. Dwi Surya Atmaja, MA  
Wahyu Nugroho, MH



Disusun Oleh :  
Noviani (12001026)

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK  
TAHUN 2022/2023**

# Tantangan Dan Hambatan Demokrasi Di Dunia Islam

## Abstrak

Dalam pandangan Islam demokrasi adalah sistem politik yang masih sering diperdebatkan oleh para ulama dan ilmuwan muslim. Bagi mereka yang menerima sistem demokrasi, mereka menganggap bahwa demokrasi berhubungan dengan Islam. Ada dua alasan yang bisa menjadi dasar untuk hal tersebut, yaitu ajaran dalam Islam bisa menjadi acuan kehidupan dan ajaran dalam Islam tentang hak-hak yang harus diusahakan untuk dipenuhi baik untuk diri sendiri maupun masyarakat atau negara. Demokrasi dan Islam dapat dipahami secara luwes dan kontekstual, oleh karena itu keduanya saling berhubungan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam mengenai demokrasi dan bagaimana tantangan dan hambatan Demokrasi yang ada di dalam dunia Islam.

**Kata Kunci:** *Demokrasi, Islam, Hambatan, dan Tantangan*

## Pendahuluan

Demokrasi merupakan salah satu sistem politik yang sampai sekarang selalu dibahas di Negara-Negara Islam. Demokrasi menyangkut tentang kekuasaan rakyat, yang di dalamnya ada sistem kekuasaan dan pemerintahan. Demokrasi adalah sebuah konsep yang terbuka untuk diperdebatkan daripada memiliki landasan otoriter dan dogmatis. Gagasan demokrasi telah menjadi topik perbincangan yang terus-menerus di antara para ilmuwan Muslim hingga saat ini. Perdebatan tentang bagaimana Islam dan demokrasi berinteraksi telah menjadi topik yang sangat menarik. (Masykuri, 2004)

Mengatakan bahwa perjalanan demokrasi di Indonesia dibagi menjadi empat periode. Pertama yaitu masa revolusi pada awal kemerdekaan. Kedua yaitu demokrasi parlementer 1950-1959. Ketiga demokrasi terpimpin 1959-1965. Keempat demokrasi Orde Baru tahun 1965-1998. Dari keempat periode tersebut tentunya memiliki sistem demokrasi yang berbeda dalam melaksanakan masa politiknya. (Afan, 1999) (Hartuti, 2004)

Demokrasi mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku setiap masyarakat. Hal ini menyebabkan pelaksanaan demokrasi memiliki karakteristik dan praktek yang tidak sama di setiap negara. Agama merupakan salah satu hal penting dalam menentukan dunia politik, yang di mana nilai agama menjadi sebuah kekuatan dalam dunia politik di Indonesia. Oleh karena itu, agama dapat memberikan pengaruh dalam pergerakan dan cita rasa demokrasi di Indonesia. (Richard, 2004)

Hubungan Islam dengan demokrasi sangat erat kaitannya. Hal ini terjadi sebagai akibat dari ajaran Islam tentang ibadah, akhlak, dan perilaku manusia. Demokrasi, di sisi lain, adalah bentuk pemerintahan yang dianggap mempromosikan cita-cita yang baik dan mekanisme interaksi antara anggota masyarakat. (Ali, 2016)

Setiap negara berdaulat mencari stabilitas politik, yang ditunjukkan oleh pemerintahan yang didukung rakyat yang berfungsi. Pengetahuan tentang sejumlah masalah krusial terkait pemerintahan, termasuk pemerintahan, dapat membantu menentukan apakah suatu negara demokratis atau tidak. (Ali, 2016)

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak sekali orang mungkin sudah tidak peduli lagi mengenai demokrasi. Banyak pemerintahan yang berjalan tidak sesuai dengan sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas hal ini. Dengan itu, penulis tertarik menulis tentang “Hambatan dan Tantangan Demokrasi Di Dunia Islam”. Penulis berharap setelah membaca tulisan ini, pembaca akan lebih memahami mengenai sistem demokrasi yang ada di Indonesia. (Abdul, n.d.)

## **Metode**

Jenis penelitian ini ditinjau dari metodenya yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif yaitu penelitian untuk mendapatkan data deskriptif misalnya kata-kata yang ditulis atau ucapan dari narasumber bahkan dapat dilihat dari perilaku yang bisa dilihat secara langsung. (Moleong, 2007)

Salah satu metode inkuiri yang menuntut kemampuan untuk mendeskripsikan makna, dan konsep adalah penelitian kualitatif. serba mandiri, menghargai kualitas, menggunakan banyak pendekatan, dan disajikan secara naratif dengan mengacu pada fenomena dan metodologi multi-fokus. Mendapatkan tanggapan atas suatu fenomena atau pertanyaan yang akan diberikan informan merupakan tujuan dari penelitian kualitatif. (Yusuf, 2014)

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Demokrasi Dalam Pandangan Islam**

Demos yang berarti rakyat dalam bahasa Yunani dan kratos yang berarti kekuasaan merupakan asal kata demokrasi. Demokrasi dapat secara luas dicirikan sebagai tentang orang dan kekuasaan. Demokrasi, menurut Sidney Hookin (Ali, 2016) adalah suatu bentuk pemerintahan di mana pilihan-pilihan atau kebijakan-kebijakan utama dipraktikkan baik secara langsung

maupun terselubung. Penjelasan tersebut sejalan dengan pendapat Joseph A. Schumpeter yang juga mengatakan bahwa demokrasi juga merupakan suatu perencanaan untuk mencapai suatu keputusan politik yang mana kebijakan-kebijakan pemerintah yang penting secara langsung maupun tidak langsung, yang berdasarkan kepada kesepakatan mayoritas rakyat-rakyat.

Dari pembahasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwanya demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang mana kekuasaan tertinggi berada dipegang oleh rakyat, serta dilaksanakan langsung oleh rakyat, atau melalui wakil rakyat yang terpilih dalam pemilu yang jujur, adil dan bebas. (Abu, 2004).

(Iftitah, 2014) Jika diperhatikan, demokrasi dipandang sebagai suatu bentuk pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk rakyat, namun tidak pernah ada dan tidak akan pernah ada. Setiap partai demokrasi akan terkekang oleh standar-standar yang mengalir dari definisi demokrasi itu sendiri, sehingga tidak mungkin menjadi demokrasi yang sesungguhnya. Moral ditegakkan dengan manfaat yang telah disebutkan untuk mendiskreditkan pemerintah otoriter, oleh karena itu tidak diragukan lagi kita membutuhkan sesuatu yang disebut demokrasi dengan partisipasi yang mendedikasikan kebijakan untuk warga negara. Sehingga dalam rapat pemilihan setiap warga negara dapat menyampaikan pendapatnya. Kata “rakyat” (Demos) dalam gagasan demokrasi modern diganti dengan kata “wakala” yang artinya wakil-wakil, sehingga hanya sekelompok kecil individu yang bertugas mengurus kepentingan rakyat. Oleh karena itu, pemerintahan perwakilan yang dipilih oleh mayoritas pemilih merupakan demokrasi modern. Persyaratan mendasar dari setiap sistem demokrasi, pada kenyataannya, adalah demokrasi perwakilan. (Ahmad, 2006)

Dalam penerapannya, demokrasi perwakilan adalah norma yang paling mendasar diantara sistem demokrasi kontemporer. Adapun ciri-ciri pertama demokrasi kontemporer menurut Dahl adalah sebagai berikut:

1. Pejabat yang terpilih

Pengawasan atas kebijakan-kebijakan perintah berhubungan dengan hukum secara konstitusi yang dikuatkan dalam pemilihan para pejabat dari rakyat.

2. Bebas, Jujur, dan Pemilihan yang berulang-ulang

Para pejabat terpilih dalam pemilu yang dilaksanakan secara jujur, adil, dan bebas, yang mana pemaksaan secara relatif itu jarang terjadi.

3. Kebebasan dalam berekspresi

Setiap rakyat memiliki hak masing-masing untuk mengemukakan pendapat pribadinya dalam permasalahan politik termasuk cara rakyat dalam mengkritik para pejabat, rezim, para peraturan-peraturan yang mencakup kehidupan beragama, bernegara, dan bermasyarakat.

4. Jalur Akses kepada Informasi Alternatif

Rakyat mempunyai hak untuk mencari informasi yang alternatif dan terikat dari masyarakat lainnya, para ahli, majalah, koran, buku, dan lainnya.

5. Otonomi Asosiasi

Rakyat memiliki hak untuk membuat suatu asosiasi atau lembaga-lembaga yang mandiri, termasuk partai politik terikat dan kelompok-kelompok kepentingan untuk bisa mendapatkan hak-hak mereka yang sesuai dengan masing-masing kelompok.

6. Kewarganegaraan yang Implusif

Tidak ada orang dewasa yang tinggal di suatu negara yang dikecualikan dari hukum negara tersebut, sehingga memungkinkan untuk menuntut hak seseorang sehubungan dengan lima institusi politik yang dijelaskan di atas. (Ahmad, 2006).

Jika diperhatikan, sudah jelas bahwa Agama dan demokrasi itu berbeda, sebagaimana yang dinyatakan oleh Gus Dur dalam (Fadil, 2022) yang mengatakan Agama dari wahyu sedangkan demokrasi berawal dari pemikiran manusia, dengan begitu agama mempunyai dialeketikkannya sendiri dan begitu juga demokrasi. Namun, menurut pemikiran saat ini, demokrasi

dapat hidup berdampingan tanpa hambatan, dan dari perspektif Islam, demokrasi mencakup fitur-fitur seperti syura dan musawah. Secara khusus, huriyah, masuliyah, dan amanah. Seiring dengan perjalanan waktu Islam dan demokrasi, seolah berkompetisi dan bersaing dalam suatu wilayah yang berbeda tetapi bertujuan untuk membela rakyat, tidak terlihat sepenuhnya dari bukti tersebut dalam pandangan lain banyak kalangan yang sengaja membenturkan kedua, tema yang ada dalam pendekatan politis, sehingga penyusunan memiliki kesimpulan awal bahwa Islam tidak bisa dibandingkan dengan demokrasi karena Islam sebagai Agama dari Allah sedangkan demokrasi adalah pemikiran manusia.

Ada beberapa ulama muslim yang tidak menerima demokrasi, bahkan mereka mengharamkan dalam penggunaan demokrasi, dikarenakan konsep demokrasi berarti menegasikan kedaulatan Allah atas manusia dan pernyataan ini tidak berasal dari kosa kata Islam, oleh karena itu harus ditinggalkan. Hafiz Salih dan Abd. Al-Qadim Zhallum merupakan tokoh yang tidak menerima demokrasi. Sedangkan para ilmuwan muslim yang menerima konsep demokrasi, mengatakan bahwa demokrasi dengan modifikasi tertentu sama dengan ajaran Islam. Hal ini dikarenakan demokrasi berdasarkan keadilan sosial dan persamaan derajat Al-Maududi dan Fazlu Rahman merupakan tokoh yang menerima konsep demokrasi. (Fadil, 2022).

## **2. Tantangan dan Hambatan Dalam Pelaksanaan Demokrasi**

Menurut Sandra Halperin dalam (Ali, 2016) Runtuhnya sistem kelas tradisional, kebangkitan kelas pekerja relatif terhadap kelas lain, perluasan sistem kapitalis, dan kebangkitan negara-bangsa adalah beberapa keadaan yang mengarah pada perkembangan demokrasi. memperluas dan mengintegrasikan di dalam negeri, dan meningkatkan kekuatan konsumen domestik. pasar, dan demokrasi terkait. Langkah-langkah redistributif yang mendorong pertumbuhan pasar domestik berbasis ekonomi sangat erat kaitannya..

Dari justifikasi ini, jelaslah bahwa pembentukan demokrasi di suatu bangsa dapat terhambat oleh ketiadaan ini. Pertama, sementara struktur kelas tradisional biasanya

dihancurkan selama demokratisasi, hal ini tidak terjadi di Timur Tengah. Meskipun banyak gerakan kemerdekaan, protes, dan pemberontakan di kawasan Timur Tengah, struktur sosial masih ada dan berfungsi. Intinya, kebangkitan pemerintahan di Timur Tengah modern hanya mengubah struktur politik kawasan; Struktur sosial yang muncul sepanjang dinasti Ottoman berlanjut hingga munculnya struktur negara modern. Situasi ini menunjukkan pentingnya pemilik tanah dalam memandu struktur sosial masyarakat Timur Tengah demi pengaturan penggunaan lahan. Banyak tindakan yang diambil untuk mempertahankan sistem sosial dan politik yang dipulihkan membuktikan hal ini. Sebagai contoh, dengan menghilangkan kelompok asing dan minoritas yang melakukan fungsi kewirausahaan sipil dalam perekonomian, perbankan, industri dan profesi lainnya, promosi industri lokal dan kewirausahaan. Itu ditemukan oleh organisasi produksi di Mesir, Suriah dan Irak pada 1950-an. Jordan dan Lebanon berjuang untuk mendiversifikasi ekonomi mereka karena birokrasi yang dipaksakan oleh elit kelas penguasa. (Halperin, 2005).

Kedua, Politisi yang otoriter, cenderung nasionalis dan tradisional, dan yang membangun politik tradisional berdasarkan agama dan antikolonialisme, benar-benar membuat komentar negatif tentang kelas pekerja. Ada tekanan pada organisasi komunis yang mendukung pembuatan rencana industrialisasi, penerapan pajak progresif, dan reformasi penguasaan tanah dan demokrasi politik. Dapat dikatakan bahwa pergerakan pekerja sangat minim dan diatur secara ketat oleh pemerintah di dalam setiap kelas kelompok pekerja. (Halperin, 2005).

(Nur, 2019) Ketiga, Di kawasan Timur Tengah, sistem kapitalis yang bercirikan kemajuan industri dan pasar terbuka tidak dapat diwujudkan dengan baik. Tuan tanah dan pedagang saat ini mendominasi sebagian besar perekonomian negara; akibatnya, tidak ada strata ekonomi yang muncul untuk menantang dominasi mereka. Contohnya saja seperti, industri minyak bumi yang dioperasikan di negeri maju yaitu Saudi Arabia. Itu hanya mempekerjakan sebagian kecil dari angkatan kerja di negara itu, dengan mayoritas penduduk lokal masih

bekerja di sektor pertanian dan jasa. Meskipun mempekerjakan lebih dari 40% tenaga kerja sejak tahun 1980, pertanian hanya dapat memberikan 7,6% pendapatan negara. (Halperin, 2005)

(Firdaus, 2011) Kehadiran organisasi-organisasi Islam sayap kanan, yang menjadi landasan perlawanan Timur Tengah terhadap komunisme dan revolusi, merupakan bukti kuatnya nilai-nilai konservatif yang terkait erat dengan nilai-nilai Islam. Ini adalah faktor lain yang membuat perkembangan demokrasi menjadi tantangan di negara-negara Timur Tengah. Penetapan Islam sebagai agama nasional bangsa-bangsa di Timur Tengah selain Libanon menjadi bukti bahwa Islam mendominasi di wilayah tersebut. Islam sebagai agama negara banyak berhubungan dengan pengaruh langsung dan tidak langsung dari pemilik tanah kaya dan elit yang perlu mempertahankan institusi sosial yang mapan. (Halperin, 2005)

Karena sifat kelompok ekstrimis ini, pemerintah tidak dapat melakukan reformasi ekonomi dan politik, yang mendorong peningkatan jumlah kelompok Islam ekstrim untuk berpartisipasi dalam politik Arab. Gerakan Ikhwanul Muslimin adalah pencetus vokal ini. Pendirinya, Hasan Albana, diangkat pada tahun 1928 dan memulai karir politiknya pada tahun 1936. (Halperin, 2005)

## **Kesimpulan**

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan yang di dalamnya mengatur mengenai keputusan-keputusan pemerintah mengenai suatu hal penting atau kebijakan yang dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Demokrasi dan Islam merupakan dua tema atau dua pembahasan yang saling berhubungan. Namun ada beberapa pendapat yang tidak menerima adanya konsep demokrasi yang dikaitkan dengan Islam, karena demokrasi lahir dari pemikiran seseorang sedangkan agama Islam turun dari Allah SWT. Namun ada juga yang menerima adanya konsep demokrasi dikarenakan di dalam demokrasi juga mengatur tentang kehidupan sosial dan lainnya. Namun di beberapa negara demokrasi tidak berkembang dengan cepat, bahkan demokrasi sulit untuk berkembang. Salah satunya adalah Timur Tengah. Karena sifat kelompok ekstrimis ini, pemerintah tidak dapat melakukan reformasi



ekonomi dan politik, yang mendorong peningkatan jumlah kelompok Islam ekstrim untuk berpartisipasi dalam politik Arab. Gerakan Ikhwanul Muslimin adalah pencetus vokal ini. Pendirinya, Hasan Albana, diangkat pada tahun 1928 dan memulai karir politiknya pada tahun 1936.

## Daftar Pustaka

- Abdul, J. (n.d.). Kompatibilitas Islam dan Demokrasi : Tantangan dan Hambatan. *Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keamanan*.
- Abu, N. M. (2004). *Menggugat Demokrasi dan Pemilu*.
- Afan, G. (1999). *Politik Indonesia : Transisi Menuju Demokrasi*.
- Ahmad, V. (2006). *Agama Politik Nalar Politik Islam Alih Bahasa Ali Syahab*.
- Ali, M. (2016). Islam dan Demokrasi Kajian Fiqih Siyasah Tentang Tantangan dan Hambatan Demokrasi Di Dunia Islam. *Jurnal Al-Ashiriyah*.
- Fadil, S. (2022). Sistem Demokrasi Indonesia Menurut Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Firdaus, S. (2011). Dilema Pluralitas : Mengenai Hambatan atau Penguatan Demokrasi Bangsa. *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Halperin, S. (2005). *he Post-Cold War Political Topography Of the Middle East: Prospects For Democracy*.
- Hartuti, P. (2004). Islam dan Demokrasi. *Jurnal Administrasi*.
- Iftitah, N. R. (2014). Islam dan Demokrasi. *Islamuna*.
- Masykuri, A. (2004). *Demokrasi Di Persimpangan Makna Alih Bahasa Wahab Wahib*.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*.
- Nur, S. M. (2019). Demokrasi dan Tantangannya Dalam Bingkai Pluralisme Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*.
- Richard, M. K. (2004). *Demokrasi Sebuah Pengantar*.
- Yusuf, A. M. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*.